

Identitas Kultural dan Gerakan Politik Kerapatan Adat Kurai dalam Representasi Politik Lokal

<http://dx.doi.org/10.18196/jgp.2012.0005>

Irawati

Universitas Andalas, Padang. Email: irawati_tandjung@yahoo.com

ABSTRACT

The strength of ethnic identity became public phenomena later gained momentum in West Sumatera when Nagari introduced by formal government. The Bukittinggi City Indigenous groups power incorporated in Kerapatan Adat Kurai (KAK) are not satisfied with the condition that Nagari are not applied in the City Government. KAK claims as a holder of authority over the area of Bukittinggi city is a source of strength to impose their demands. However during the reign of the new order, KAK losing their existence and influence over local politics. Losing their influence on formal governance, make KAK indigenous leaders trying to restore the system of Nagari Government which will give a space for them to power. There are indications that KAK demand is an attempt to restore the power of traditional elites. KAK movement more motivated by political interests to gain access and representation of their group within local government. The movement dynamics is closely linked with the interests of the actors to find support in a particular political event. The indigenous elite (traditional leaders) as the initiators have not obtained a good representation as politically, culturally and economically in local politics. Keywords: Kerapatan Adat Kurai (KAK), Political movement, Nagari government system.

ABSTRAK

Kekuatan identitas etnis menjadi fenomena publik kemudian mendapatkan momentum di Sumatera Barat ketika Nagari introduced menjadi pemerintah formal. Kota Bukittinggi Adat kelompok kekuatan yang tergabung dalam Kerapatan Adat Kanagarian Kurai (KAK) merasa tidak puas dengan kondisi tidak diterapkannya pemerintahan Nagari di kota.

KAK klaim sebagai pemegang otoritas atas wilayah Kota Bukittinggi adalah sumber kekuatan untuk memaksakan tuntutan mereka. Namun, pada masa Pemerintahan Orde Baru, KAK kehilangan keberadaan dan pengaruh atas politik lokal. Kehilangan pengaruh mereka pada pemerintahan formal, membuat KAK sebagai pemimpin adat mencoba untuk memulihkan sistem dari Pemerintah Nagari yang akan memberikan ruang bagi mereka untuk berkuasa. Ada indikasi bahwa permintaan KAK adalah upaya untuk mengembalikan kekuatan elit tradisional. Gerakan KAK lebih dimotivasi oleh kepentingan politik untuk mendapatkan akses dan representasi dari kelompok mereka dalam pemerintahan lokal. Dinamika gerakan KAK terkait erat dengan kepentingan aktor untuk mencari dukungan dalam peristiwa politik tertentu. Para elit adat (pemimpin tradisional) sebagai inisiator belum memperoleh representasi yang baik secara politik, budaya dan ekonomi dalam politik lokal.

Kata Kunci: Kerapatan Adat Kurai (KAK), Gerakan Politik Lokal, Sistem Pemerintahan Nagari

PENDAHULUAN

Menguatnya identitas etnik ini menjadi fenomena yang ditemukan di berbagai daerah di Indonesia, seperti kembalinya kekuatan Keraton Surakarta di Solo, Pengaruh Puri di Bali dan kemunculan kembali kesultanan Ternate, Kesultanan Kutai Kertanegara di Kalimantan dan Keraton Yogyakarta (Dwipayana, 2004: 8). Pada umumnya, kelompok-kelompok masyarakat adat ini mengedepankan politik identitas (Eko, 2005: 98) untuk memperjuangkan kebebasan budaya dan menghendaki pengakuan atas eksistensi mereka.

UU No. 22/1999 jo UU No. 32/2004 semakin memperkuat posisi entitas politik etnik dengan adanya pengakuan terhadap hak asal-usul. Kebijakan ini memberi inspirasi kelompok-kelompok masyarakat adat untuk membangkitkan kembali nilai-nilai lokal menjadi konsep dalam pemerintahan formal yang diakui negara. Kewenangan daerah untuk membangun berdasarkan konteks lokal masing-masing ini, dalam perjalanannya membuat elit daerah melakukan revitalisasi nilai-nilai adat budaya dan agama yang merambah ke ranah publik.

Sumatera Barat merupakan salah satu daerah yang sangat cepat merespon peluang untuk memunculkan identitas lokal ini. Semangat kebangkitan ini kemudian termanifestasi dengan diterapkannya Pemerintahan Nagari sebagai bentuk pemerintahan terendah di Sumatera Barat. Namun, konsep ini hanya diterapkan di kabupaten, tidak di kota. Tidak adanya kedudukan struktural Nagari di dalam pemerintahan kota,

karena terkendala dengan pasal 126 UU No 22/1999 Tentang Pemerintahan Daerah, karena sistem pemerintahan terendah di kota adalah kelurahan (Zetra, 2005: 14).

Kekuatan identitas etnik yang menjadi fenomena umum kemudian mendapat momentum di Sumatera Barat. Kekuatan kelompok adat di Kota Bukittinggi yang tergabung dalam Kerapatan Adat Kurai (KAK) merasa tidak puas dengan kondisi tidak diterapkannya pemerintahan nagari di kota. Mereka menuntut diterapkan Pemerintahan Nagari seperti halnya di wilayah kabupaten lainnya di Sumatera Barat. KAK kemudian memperjuangkan tuntutan mereka untuk melaksanakan Pemerintahan Nagari di kota, terutama pasca keluarnya UU No. 32/2004. Tuntutan KAK ini kembali menguat pada 2005, dimana pada tahun yang sama Kota Bukittinggi melaksanakan pilkada langsung. Peluang ini dimanfaatkan oleh para tokoh KAK untuk memunculkan kembali tuntutan mereka. Ada indikasi bahwa isu ini akan menguatkan solidaritas kelompok orang Kurai. *Klaim* KAK sebagai pemegang kuasa atas wilayah Kota Bukittinggi menjadi sumber kekuatan untuk memaksakan tuntutan mereka. Orang Kurai sendiri mengklaim bahwa mereka merupakan penduduk asli Kota Bukittinggi. Rasa kepemilikan kelompok etnis ini yang kemudian memunculkan berbagai tuntutan yang memanfaatkan identitas etnik. Tidak jarang juga ini merupakan wadah bagi kelompok elit untuk mengembalikan eksistensi dan kekuasaan mereka (Eko, 2005: 92).

Elit-elit dan organisasi kultural cukup dominan dalam memainkan peran-peran sosial yang berkaitan dengan simbol-simbol etnis sebagai satu gerakan kepentingan politik mereka, dimana identitas etnis dikerahkan sebagai suatu bahan obyek politik. Dalam pandangan tersebut, bahwa perspektif konstruktif etnik terbentuk karena ada pihak yang mengkonstruksinya. Penulis melihat bahwa upaya KAK sebenarnya merupakan rekonstruksi gerakan politik kelompok elit untuk menunjukkan eksistensi kepentingan mereka selaku komunitas lokal (kelompok kepentingan). Nagari sebagai identitas etnis digunakan sebagai bahan obyek oleh para elit guna memunculkan isu dan mencari wadah untuk menyalurkan kepentingan mereka. Berdasarkan gambaran permasalahan di atas, ada dua pertanyaan yang hendak dijawab dalam penelitian ini: Apa motivasi gerakan politik KAK dalam politik lokal di

Kota Bukittinggi? Bagaimana dinamika gerakan politik KAK dalam politik lokal di Kota Bukittinggi?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode *field research* (penelitian lapangan). *Field research* secara langsung bersentuhan dengan fenomena sosial yang diteliti (Babbie, 1983: 245-247). Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam dan dokumentasi. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik *purposive sampling*. Analisis data menggunakan metode emik dan etik serta literatur yang berhubungan dengan masalah penelitian.

KERANGKA TEORITIK

Dalam khasanah gerakan sosial yang berkembang di barat, banyak sekali pespektif yang berkembang dalam menganalisa kemunculan gerakan sosial. Paling tidak terdapat sedikitnya empat perspektif atau pendekatan dalam memahami terjadinya gerakan-gerakan sosial, yakni perspektif perilaku kolektif (*collective behavior*), mobilisasi sumber daya (*resource mobilization*), proses politik (*political process*) dan gerakan sosial baru (*new social movements*) (Tarrow, 1998; 14-18). Sedangkan McAdam (1996; 2) melihat tiga faktor utama dalam menganalisis kemunculan dan perkembangan gerakan sosial, yakni; mobilisasi sumberdaya (*resource mobilization*), peluang politik (*political opportunities*) dan proses pembingkaiian (*framing process*).

Pertama, pendekatan mobilisasi sumber daya. Perspektif ini melihat bahwa masalah dan ketegangan sosial sebagai sesuatu yang nyaris melekat dalam masyarakat. Karena itu, gerakan sosial sangat tergantung pada kemampuan memobilisasi sumberdaya, akumulasi sumberdaya, dan koordinasi di antara aktor politik untuk merespon masalah tersebut. Perspektif mobilisasi sumberdaya mengajukan tesis baru bahwa organisasi-organisasi gerakan memberikan struktur mobilisasi yang sangat krusial bagi aksi kolektif dalam bentuk apapun (Porta dan Diani, 1999; 3-4). McCharty (1996; 141) mengungkapkan, bahwa mobilisasi sumberdaya adalah sejumlah cara kelompok gerakan melebur dalam aksi kolektif, termasuk di dalamnya taktik gerakan dan bentuk organisasi gerakan.

Konsep ini berfokus pada jaringan informal, organisasi gerakan dan kelompok-kelompok di tingkatan meso. Sukses tidaknya perjuangan orang/kelompok tergantung pada kemampuan mereka untuk memaksimalkan akses menuju sumber-sumber organisasional. Semua jenis *setting* kolektif pada akar rumput bisa menjadi titik tolak untuk mengorganisir suatu gerakan (Klinken, 2007; 13). Bagi para pendukung teori ini, aksi kolektif merupakan sarana untuk mencapai tujuan, cara yang dipilih di antara berbagai cara yang tersedia. Dalam hal inilah organisasi dalam gerakan secara signifikan berfungsi: (1) dalam konstruksi dan rekonstruksi keyakinan-keyakinan kolektif; (2) dalam mentransformasikan ketidakpuasan ke dalam aksi kolektif; dan (3) dalam mempertahankan komitmen terhadap gerakan (Klandermans, 2005; 25).

Singkatnya, pendekatan ini menyatakan bahwa gerakan sosial muncul sebagai konsekuensi dari bersatunya para aktor dalam cara-cara yang rasional, mengikuti kepentingan-kepentingan mereka dan adanya peran sentral organisasi serta para kader dan pemimpin profesional untuk memobilisasi sumberdaya yang ada pada mereka. Kekuatan gerakannya tergantung pada tersedianya sumber daya, baik sumber daya material (seperti usaha, uang, keuntungan konkret, jasa) dan sumberdaya non-material (seperti otoritas, pertalian moral, kepercayaan, persahabatan, dan *network*) di dalam organisasi tersebut, termasuk di dalamnya besarnya partisipan, dana, publikasi media, dukungan opini publik dan elite (Porta dan Diani, 1999: 8).

Kedua, pendekatan peluang politik (*political opportunities*). Pendekatan peluang politik ini tidak lagi sekadar terfokus secara sempit pada kehidupan internal organisasi gerakan, tetapi memberikan perhatian yang lebih sistematis pada lingkungan politik dan institusi. Gerakan sosial ditentukan oleh peluang dan ancaman di dalam sistem politik tertentu dan lingkungan yang lebih luas, atau apa yang kemudian lebih dikenal secara luas dengan konsep *political opportunity structure* (McAdam, et.all, 1996; 4). Peluang politik menentukan kapan sebuah gerakan sosial memiliki peluang terbaik untuk mendapatkan kemajuan-kemajuan signifikan. Tarrow (1998; 20, 76-77) mendefenisikan *political opportunity* sebagai “*consistent – but not necessarily formal or permanent – dimensions of the political environment that provide for collective action by affecting people’s*

expectations for success or failure.” Tarrow menekankan, bahwa ketegangan politik mengalami peningkatan ketika para aktor gerakan mendapatkan dukungan sumberdaya eksternal untuk mencapai tujuan yang mereka inginkan. Sumber daya ini dipergunakan oleh aktor gerakan melalui terbukanya akses kepada kelembagaan politik.

Beberapa dimensi penting dari struktur peluang politik adalah: (1) tingkat keterbukaan dan tertutupan di dalam sistem politik terinstitusionalisasi (*institutionalized political system*); (2) stabilitas dan instabilitas perangkat atau susunan elit (*elite alignments*) yang luas, yang secara tipikal menyiapkan (*undergird*) sebuah pemerintahan; (3) ada dan tidak adanya pengelompokan-pengelompokan elit; (4) kapasitas negara dan kecenderungan untuk menindas (McAdam, 1996; 27). Secara sederhana, perspektif ini memandang lingkungan eksternal sangat mempengaruhi gerakan sosial. Di negara yang menganut sistem demokrasi atau konfigurasi politik demokratis, terbuka kesempatan bagi rakyat untuk melakukan berbagai bentuk partisipasi politik. Peluang-peluang politik juga tidak hanya menguntungkan bagi gerakan sosial. Namun, ia bisa juga dipergunakan oleh para lawannya untuk melemahkan gerakan. Dengan kata lain, peluang tersebut bukanlah monopoli gerakan, tetapi bisa juga dimanfaatkan kekuatan-kekuatan kontra-gerakan, yang kepentingan di antara mereka berbeda secara diametral. Bisa jadi, semakin tersedia peluang dan akses pada sistem pengambilan keputusan, membuat gerakan sosial semakin cenderung mengadopsi strategi moderat dan terjerumus ke jalur-jalur resmi (Gamson and Mayer, 1966; 277).

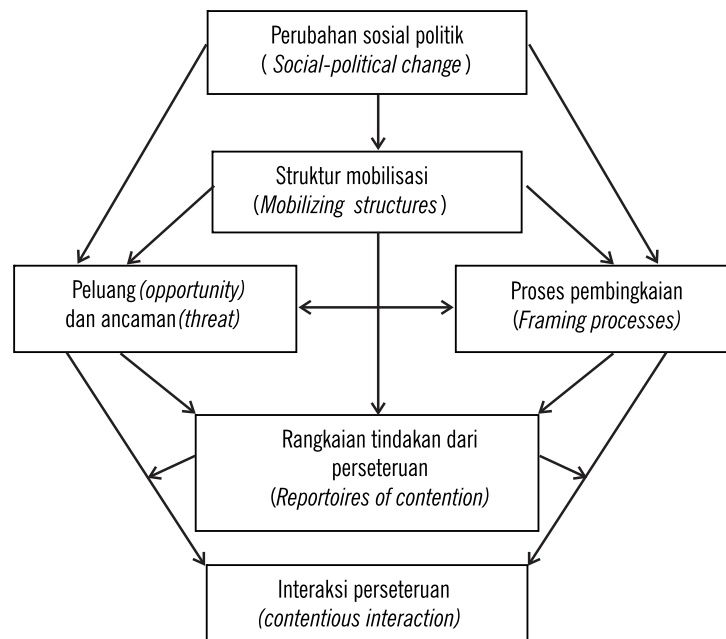
Ketiga, pendekatan proses pbingkai (*framing process*). Pendekatan ini lebih memusatkan perhatian pada peranan usaha menguasai ide-ide dan identitas-identitas baru dalam membentuk gerakan-gerakan sosial. Pendekatan ini memfokuskan kajiannya pada pertanyaan seperti bagaimana para aktor sosial mbingkai klaim-klaim mereka, identitas-identitas mereka, menentukan lawan-lawan mereka? Para organisator gerakan melakukan mobilisasi dengan jalan melukiskan isu-isu untuk para calon pendukung dengan memberikan makna bagi mereka. Snow dan Benford menekan dua komponen penting dalam mem-*framing* gerakan yaitu diagnosis elemen atau mendefenisikan masalah dan sumbernya dan prediksi elemen sekaligus mengidentifikasi strategi yang tepat untuk

memperjuangkan masalah tersebut.

Proses pembingkaihan dilakukan untuk (1) memperkuat kesadaran kolektif, keputusan-keputusan strategis sebagai bagian dari gerak; (2) mempertegas dan memperkuat subjek kontestasi antara aktor gerakan selaku representasi gerakan dengan negara dan para kelompok-kelompok yang berlawanan. Aktor-aktor yang berbeda baik di dalam maupun diluar gerakan, dalam konteks beragamnya kelompok sasaran, adalah faktor melebarnya *framing*. Agen-agen gerakan berupaya membawa isu mereka ke dalam kelompok sasaran yang beragam seperti media, partai politik, pejabat parlemen dan pemerintah (Gamson and Mayer, 1966; 15-16, 292).

Proses pembingkaihan ide-ide dan isu-isu dimunculkan dari awal gerakan akan lebih maksimal, tetapi bisa juga merupakan hasil proses prosedural dari organisasi formal gerakan. Dengan melihat interaksi dari ketiga pendekatan ini digunakan untuk menganalisa gerakan sosial yang kemudian diasimilasikan sebagai bentuk politik perseteruan (*contentious politics*).

Secara skematis teori gerakan ini menjelaskan perseteruan politik (*contentious politics*) sebagai berikut:



Sumber: diadopsi dari McAdam, et. al, 1996 : 17

GAMBAR 1. TEORI SOSIAL MOVEMENT TENTANG POLITIK PERSETERUAN
(CONTENTIOUS POLITICS), .

Interaksi antara faktor dalam politik perseteruan ini cenderung melakukan pendekatan eklektis dalam memahami gerakan sosial politik, dengan meminjam penjelasan-penjelasan yang relevan dari semua perspektif yang ada. Untuk menganalisa politik perseteruan, McAdam, et.all (1996; 12-13, 24) menekankan pada proses dan mekanisme kausal di antara faktor yang mendorong timbulnya gerakan. Analisa ini lebih melihat dinamika yang terjadi dalam gerakan. Mekanisme didefinisikan sebagai sebuah kejadian yang mengubah hubungan-hubungan di antara elemen-elemen tertentu dan cara-cara serupa. Sedangkan proses diartikan sebagai serangkaian mekanisme-mekanisme yang lebih elementer, dimana satu proses bisa menghasilkan banyak akibat yang berlainan. Terdapat lima proses kunci dalam politik perseteruan yakni:

1. Pembentukan identitas (*identity formation*). Proses ini mengangkut bagaimana identitas bersama berkembang dalam sebuah kelompok? Sebagian dari mekanisme ini bersifat kognitif dan beberapa relasional. Pembentukan identitas-identitas politis melibatkan perubahan-perubahan kesadaran pada orang-orang yang berada dalam identitas tersebut dan juga melibatkan perubahan hubungan-hubungan di antara orang-orang dan kelompok-kelompok yang dipengaruhi (McAdam, et.all, 1996; 28).
2. Eskalasi (*scale shift*), merupakan proses di mana jumlah dan tingkatan tindakan-tindakan perseteruan yang terkoordinasi meningkat, yang mengakibatkan perseteruan yang melibatkan aktor-aktor yang lebih luas dan yang menjembatani klaim-klaim mereka dengan identitas-identitas mereka (McAdam, et.all, 1996; 331-336).
3. Polarisasi (*polarization*), bagaimana ruang politik antara pihak-pihak yang saling berseteru meluas ketika para peserta itu saling menjauh dan bergerak ke arah titik-titik ekstrem? Polarisasi terbentuk ketika kelompok elit melihat adanya peluang atau ancaman. Polarisasi merupakan kombinasi jalinan mekanisme-mekanisme peluang atau ancaman, kompetisi dan perantara yang ada di mana-mana (McAdam, et.all, 1996; 322).
4. Mobilisasi (*Mobilization*), suatu proses yang merupakan rangkaian sejumlah mekanisme-mekanisme yang saling berinteraksi, mulai dari lingkungan yang lebih luas diberi label “proses-proses perubahan sosial”

melampaui mekanisme-mekanisme seperti atribut peluang dan ancaman, pemberian sosial, penyusunan perselisihan, dan menyusun bentuk yang inovatif untuk aksi kolektif (McAdam, et.all, 1996; 28).

5. Pembentukan aktor (*actor constitution*). Pembentukan aktor ini melibatkan sejumlah mekanisme dasar seperti bagaimana orang-orang menciptakan organisasi atau mengambil alih organisasi yang sudah ada untuk mengajukan kepentingan mereka. Organisasi kemudian membentuk rangkaian aksi inovatif untuk memiliki efek kuat bagi kelompok mereka maupun kelompok lawan atau diluarnya.

Proses-proses ini tidak dilihat secara parsial, tetapi merupakan mekanisme yang saling berhubungan di antara elemen-elemen. Interaksi di antara aktor juga menjadi perhatian seperti jaringan interpersonal, komunikasi interpersonal dan berbagai bentuk negosiasi, termasuk negosiasi tentang identitas yang akan menggambarkan dinamika dalam politik persetujuan (McAdam, et.all, 1996; 22).

HASIL DAN ANALISIS

1. Perubahan Situasi Sosial Politik di Bukittinggi

Kemunculan gerakan politik KAK tidak dapat dilepaskan dari perubahan politik yang terjadi pada tingkat nasional dan lokal. Perubahan politik nasional pasca gerakan massa 1998 terlihat nyata dari kebijakan hubungan pusat dengan daerah. Keputusan Pemerintah Pusat untuk menerapkan kebijakan desentralisasi sebagai jawaban atas tuntutan berbagai elemen masyarakat mempunyai dampak yang sangat besar bagi perubahan politik nasional maupun daerah. Prinsip desentralisasi yang dianut dalam UU No. 22/1999 jo UU 32/2004 yang memberikan kewenangan yang berlebihan kepada kabupaten dan kota.

Hal yang sama juga terjadi di Sumatera Barat, dengan otonomi daerah mengembalikan kesadaran etnik akan identitas Minangkabau. Berbagai diskusi yang kemudian diadakan baik oleh akademisi, para tokoh adat dan pemerintah daerah, semakin menguatkan kesadaran akan identitas etnik ini. Pro dan kontra antar intelektual, diskusi sejarah, dan nostalgia tentang nagari menjadi berita yang tidak pernah absen dalam semua koran lokal di Padang. Para tokoh masyarakat baik dari tokoh adat, tokoh agama

maupun tokoh intelektual berlomba-lomba mengklaim Nagari sebagai karakteristik etnik Minangkabau yang demokratis dan egaliter.

Kesadaran kolektif yang terbangun kuat ini kemudian menghasilkan pemahaman dan kesepakatan yang sama di Sumatera Barat untuk mengembalikan Pemerintahan Nagari sebagai bentuk pemerintahan formal terendah. Setelah diskusi yang panjang, Provinsi mengundang Perda No. 9/2000 yang efektif dilaksanakan pada Januari 2001. Sesuatu yang menarik dilihat dari kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tentang Pemerintahan Nagari dalam Perda No. 9/2000 ini adalah tidak adanya pengaturan tentang Pemerintahan Nagari di wilayah kota. Kebijakan pembentukan Pemerintahan Nagari sebagai pemerintahan terendah hanya diberlakukan di tingkat kabupaten. Sedangkan di kota tidak ada kedudukan struktural Nagari, karena UU Nomor 22/1999 tidak memberikan kesempatan untuk itu. Pasal 126 UU No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah menetapkan bahwa sistem pemerintahan terendah di kota adalah kelurahan. Padahal bagi masyarakat Sumatera Barat, Nagari tidak hanya dikenal pada tatanan masyarakat di kabupaten saja, tetapi juga di kota. Pembatasan oleh UU ini menyebabkan dilema yang cukup rumit bagi Pemerintah Provinsi dalam membuat kebijakan Nagari secara komprehensif di seluruh kawasan Sumatera Barat.

Secara historis pun kota-kota di Sumatera Barat sebenarnya sudah memiliki pengalaman dengan Pemerintahan Nagari. Demikian juga dengan Kota Bukittinggi sudah memiliki sejarah yang panjang tentang Pemerintahan Nagari. Kota Bukittinggi sendiri merupakan wilayah sebuah Nagari yang disebut Nagari Kurai Limo Jorong. Kebijakan Pemerintah provinsi yang penuh dilema ini merupakan salah satu faktor yang mendorong munculnya gerakan KAK. Disisi lain, dinamika politik lokal setelah pemberian Otda begitu hangat dengan berbagai isu yang bersifat *chauvinisme*. Selama pergeseran dalam politik lokal dan hubungan-hubungan kekuasaan, gagasan-gagasan tentang identitas telah dipolitisir (Eindhoven, 2007: 88). Pemilihan walikota yang selama Orde Baru sangat sentralis, dengan UU baru diserahkan pada DPRD masing-masing. Sitisai politik di Kota Bukittinggi pada 1999-2000 juga menjadi hangat karena pada saat ini bertepatan dengan pemilihan walikota dan wakil walikota. Seperti halnya di daerah-daerah lain di Indonesia isu “putera asli daerah”

selalu hadir dalam perebutan mengenai kedudukan politis. Hanya “putera asli daerah” lah yang boleh mengendalikan pemerintahan lokal karena hanya mereka yang dipercaya mampu mengamankan penanganan dengan hak-hak istimewa atas komunitas-komunitas mereka dalam alokasi-alokasi sumber-sumber ekonomi dan kedudukan-kedudukan pemerintah (Aspinal dan Fealy, 2003; 6).

Kota Bukittinggi yang pada 2000 harus memilih walikota baru juga tak luput dari isu ini. Dua pasangan calon yang maju untuk pemilihan walikota oleh DPRD mendapat hembusan isu soal putera daerah. Pasalnya salah satu pasangan calon walikota yaitu Drs. Djufri bukan merupakan orang asli Kurai yang diklaim sebagai penduduk asli Bukittinggi. Namun dalam pemilihan walikota yang dilakukan oleh DPRD hasil pemilu 1999 memenangkan pasangan Djufri-Khairul Hamdi sebagai Walikota dan Wakil Walikota periode 2000-2005. Kekalahan orang Kurai asli ini oleh beberapa orang tokoh menjadi isu yang kemudian dipertahankan dan dihembuskan.

Pada saat yang bersamaan di Kota Bukittinggi juga terjadi konflik yang cukup rumit dengan pemerintah Kabupaten Agam soal perluasan wilayah kota. Pada masa pemerintahan transisi yang dipegang oleh BJ Habibie, menandatangani PP No.84/1999 tentang perluasan wilayah Kota Bukittinggi yang mengambil sebagian wilayah Kabupaten Agam. PP ini mengatur tentang Perubahan Batas wilayah Kota Bukittinggi dengan Kabupaten Agam dengan memasukkan sebagian dari wilayah Kabupaten Agam. Tetapi dalam pelaksanaan PP ini mendapat penolakan dari Pemerintah Kabupaten Agam dan beberapa wilayah yang menjadi bagian dari perluasan tersebut. Daerah kabupaten Agam yang dimasukkan dalam perluasan Kota Bukittinggi ini pada tahap implemetasi PP sejak 2001 sudah melaksanakan sistem Pemerintahan Nagari. Beberapa nagari yang menolak beralasan bahwa dengan masuk menjadi bagian dari wilayah Kota Bukittinggi tatanan kehidupan bernagari yang baru diterapkan di kabupaten Agam akan pudar dan hilang (Ikatan Keluarga Banuhampu, Jakarta, 2002).

Penolakan ini begitu kuat pada 2000-2002 bahkan seringkali menimbulkan benturan antara pemerintah Kota Bukittinggi dengan pemerintah Kabupaten Agam. Persoalan ini tidak hanya menjadi pro dan

kontra antara pemerintah Agam dan Kota Bukittinggi, tetapi juga memunculkan pro dan kontra dari elit di Kota Bukittinggi sendiri yang kemudian memicu pertentangan dan isu-isu baru. Pemerintah Kota Bukittinggi mengakomodir keresahan masyarakat Nagari yang menolak untuk masuk wilayah kota, dengan tetap mengizinkan bentuk pemerintahannya adalah Pemerintahan Nagari dengan mengeluarkan Perda. Kebijakan ini kemudian menjadi pemicu kontra dari pihak masyarakat Kurai. Kelompok kultural di Kota Bukittinggi yang tergabung dalam KAK melakukan penolakan juga terhadap pelaksanaan PP No. 84 tersebut.

Perubahan situasi politik nasional maupun lokal seperti yang telah dijelaskan di atas, memberikan kesadaran yang kuat bagi komunitas-komunitas lokal yang selama beberapa dekade kehilangan peluang. Sebagai catatan penting perubahan politik dan kebijakan-kebijakan baru pasca 1998 ini memberi peluang yang terbuka bagi munculnya isu-isu baru yang menggerakkan dan menjadi kekuatan bagi munculnya kesadaran-kesadaran etnik di daerah. Konstelasi politik lokal yang sedang dalam perubahan besar membuka ruang bagi kelompok-kelompok kultural yang selama Orde Baru tersingkirkan. Konsep kesempatan ini yang merupakan kunci utama pendekatan *contentious politics* dalam menjelaskan dasar terjadinya gerakan politik.

Dilema kebijakan Pemerintah Provinsi tentang Pemerintahan Nagari yang tidak komprehensif dan tidak mampu menampung seluruh keinginan kelompok adat di berbagai wilayah menjadi peluang yang kuat memunculkan konflik dalam arti luas. Paling tidak ada dua hal yang perlu dicermati dari konteks perubahan situasi sosial politik yang terjadi di Kota Bukittinggi. *Pertama*, adanya peluang pada dimensi waktu yang bersamaan akibat kebijakan negara atau pemerintah provinsi. Euforia desentralisasi dan kebebasan mendapat ruang dengan legitimasi UU untuk menggali kembali identitas etnik dan hak asal usul. Kebijakan penerapan Pemerintahan Nagari yang dilematis menjadi peluang bagi munculnya gerakan. *Kedua*, ada ruang perebutan kepentingan dan kekuasaan oleh elit. Perebutan kekuasaan dalam politik lokal dengan prinsip desentralisasi merupakan ajang kompetisi berat bagi elit. Peluang ini menciptakan kesempatan-kesempatan bagi gerakan-gerakan untuk melakukan mobilisasi komunal.

2. Inisiasi dan Pelembagaan Isu oleh Kerapatan Adat Kurai (KAK)

Mengenai siapa aktor yang mulai memunculkan isu tidak begitu jelas. pemerintah seperti yang diakui oleh Khairul Hamdi yang pada saat itu menjabat wakil walikota, isu tentang nagari ini dimunculkan oleh para ninik mamak yang ada dalam KAK. Mereka merasa perlu ada nagari di kota seperti yang sudah dilaksanakan di kabupaten (Wawancara dengan Bapak Khairul Hamdi, 31 Desember 2009). Tetapi para tokoh adat sendiri mengungkapkan bahwa isu Nagari ini dilontarkan oleh Drs. Djufri (Walikota) pada akhir 2000. Ninik mamak yang pada umumnya telah memiliki kesadaran akan peluang mereka dengan Nagari, menyambut dengan semangat lontaran sang Walikota. Mereka berupaya untuk menghidupkan kembali respek terhadap adat dan para pemimpin adat. Realitasnya para ninik mamak ini jelas sudah memiliki kesadaran yang tinggi akan pentingnya nagari bersamaan dengan makin kuatnya diskusi dan wacana nagari semenjak tahun 1998 di Sumatera Barat. Apalagi diskusi-diskusi, seminar intensif pada tahun 1998-2001 oleh para tokoh Sumatera Barat seringkali diselenggarakan di Kota Bukittinggi. Tawaran isu yang diberikan oleh Walikota dimanfaatkan oleh para tokoh elit adat (ninik mamak) untuk mengembalikan identitas nagari. Ide yang didapat dari walikota ini dibawa oleh 3 orang ninik mamak yang tergabung dalam KAK menjadi diskusi dalam organisasi. Secara rutin para ninik mamak yang ada dalam KAK mulai mendiskusikan tentang nagari Kurai yang mereka kelola dan kuasai.

Jika dilihat dari situasi politik kota pada tahun 2000-2001 ini ada kemungkinan cukup kuat bahwa isu nagari dimunculkan dari Pemerintah Kota Bukittinggi, karena pada saat yang bersamaan konflik tentang perluasan kota sedang berlangsung juga menyangkut isu nagari. Perluasan Kota Bukittinggi yang didasari oleh PP No. 84/1999, mendapat penolakan yang begitu kuat dari wilayah-wilayah Agam yang akan masuk kawasan kota. Alasan penolakan ini oleh masyarakatnya karena mereka sudah melaksanakan Pemerintahan Nagari. Sedangkan di Kota Bukittinggi tidak menerapkan. Jika masuk wilayah kota akan dapat merusak tatanan Nagari yang telah mereka nikmati.¹ Dengan situasi seperti ini yang paling rasional dilakukan pemerintah Kota Bukittinggi adalah berusaha untuk melegalkan Nagari ada di kota. Keinginan ini sangat memungkinkan pemerintah Kota

Bukittinggi berinisiatif memunculkan isu nagari di kota agar mendapat simpatik dari daerah-daerah yang menolak tersebut.

Pemerintah kota yang sudah sadar betul bahwa pemerintahan nagari di kota tidak dapat direalisasikan karena terbentur ketentuan legal formal undang-undang, maka mencoba memanfaatkan para tokoh adat untuk memunculkannya. Isu ini seperti sengaja dihembuskan melalui para ninik mamak agar menjadi alat untuk memperjuangkan. Tujuannya adalah untuk dapat memaksa provinsi melaksanakan pemerintahan nagari di daerah perluasan ini, sehingga masyarakat daerah ini tidak lagi menolak masuk wilayah Kota Bukittinggi. Dengan membuat isu ini muncul dari bawah sebagai aspirasi masyarakat akan lebih memudahkan pemerintah kota untuk melegitimasi.

Peran elit dan organisasi kultural cukup dominan untuk memainkan peran- sosial yang berkaitan dengan simbol-simbol etnis sebagai satu gerakan kepentingan politik mereka, dimana identitas etnis dikerahkan sebagai suatu bahan obyek politik. Dalam kasus ini, keterlibatan pemerintah kota dalam memulai isu menjadi sangat beralasan. Dengan memanfaatkan tokoh adat dan organisasi kultural sebagai alat. Para ninik mamak (elit adat) menjadi agen sekaligus aktor untuk memunculkan dan mengembangkan isu Nagari. Sedangkan KAK selaku organisasi komunal menjadi wadah yang tepat untuk memobilisasi dan pengembangan isu.

KAK sebagai organisasi adat tertinggi di Kurai menjadi wadah yang dianggap paling tepat bagi kepentingan ini. KAK merupakan perkumpulan atau organisasi yang mewadahi para pemuka adat (ninik mamak) seluruh Nagari Kurai Limo Jorong yang berada dalam wilayah administrasi Kota Bukittinggi. Secara individual, para ninik mamak (penghulu) ini masih memiliki pengaruh dan hubungan personal yang cukup kuat dengan para pejabat pemerintah kota. Kedudukan mereka selaku pemimpin informal yang mendapat legitimasi dari masyarakat menjadi alasan yang cukup penting bagi pejabat-pejabat pemerintah untuk menggunakan mereka dalam mengembangkan isu nagari. Pemanfaatan KAK sebagai organisasi menjadi penting untuk wadah memperkuat isu dan memobilisasi dukungan yang lebih luas.

Isu gerakan KAK ini dari awal justru dibentuk oleh aktor di luar KAK itu sendiri. Isu Nagari yang menjadi hangat pada saat itu dimanfaatkan

oleh pemerintah kota bagi mencari dukungan untuk kepentingan mereka. Menjadi sangat wajar gerakan ini lebih banyak didasari oleh motivasi lain di luar pembentukan Pemerintahan Nagari itu sendiri, baik motivasi eksistensi kultural, politik, maupun kepentingan untuk mendapatkan representasi dalam birokrasi lokal. Tetapi menjadi sebuah catatan penting para aktor ini bersepakat menggunakan KAK sebagai lembaga untuk mengusung dan mewadahi gerakan ini. Organisasi KAK ternyata memiliki kapasitas untuk melembagakan isu Nagari, yang dengan sangat cepat dikaitkan dengan identitas etnik Kurai. Sudah menjadi sebuah kewajaran ketika para aktor memiliki tujuan tertentu mereka mencari organisasi sebagai alat bagi perjuangan mereka. Peranan organisasi akan sangat besar ketika para aktor utama mampu mengendalikan dan memobilisasi sumber daya yang dimiliki organisasi maupun sumberdaya lainnya.

3. Dinamika Gerakan Politik Kerapatan Adat Kurai (KAK)

Gerakan politik KAK dalam aksinya mengalami pasang surut. Gerakan politik ini pada periode tertentu menguat dan mendapat dukungan yang luas dari aktor. Tetapi pada periode tertentu tuntutan KAK ini seakan hilang sama sekali. Pasang-surutnya gerakan tidak lepas juga dari pengaruh reaksi dari lawan (Pemerintah Kota) dan peran aktor-aktor pendukung lainnya. Pemanfaatan peluang politik, pembentukan identitas, perluasan aktor hingga aksi menjadi hal yang menarik untuk dicermati. Dinamika pasang surut atau naik turunnya aksi menjadi rangkaian peristiwa gerakan yang dapat dilihat dari peran organisasi sebagai wadah gerakan dan para aktor-aktor selaku penggerak.

a. Periode Awal Gerakan

Isu Pemerintahan Nagari muncul di Kota Bukittinggi ketika ruang ini dibuka oleh pemimpin (Walikota) pada pertengahan 2001. Para ninik mamak yang telah memiliki kesadaran akan peluang mereka dengan sangat cepat mengambil kesempatan ini. Meskipun kemudian secara legal formal pembentukan nagari yang menjadi isu tuntutan terhalang oleh UU, isu ini tetap saja dikembangkan oleh para ninik mamak. Para kaum adat mulai mengembangkan isu pada tingkatan ninik mamak secara luas di Bukittinggi dengan menggerakkan identitas etnik Kurai. Identitas merupakan semacam solidaritas, ikatan individu dengan kelompok. Isu

nagari kemudian disusuli oleh pembentukan identitas orang Kurai selaku penduduk asli menjadi semakin kuat. Pemunculan identitas menjadi sangat penting ketika para anggotanya menyadari posisi mereka yang terpingirkan secara politik, sehingga mereka membutuhkan identitas yang jelas (Kilnken, 2007; 106). Selama Mei-September 2001 diskusi-diskusi yang intens dilakukan oleh para ninik mamak yang dimotori oleh anggota KAK untuk membangkitkan rasa kepemilikan atas identitas Kurai (Wawancara dengan Dt. Yang Basa, 7 Januari 2010, dan Wawancara dengan Dt. Sati, 8 Desember 2009.² Penelusuran sejarah dan pelebagaan isu oleh KAK berusaha menyebarkan identitas ini pada para intelektual Kurai, baik yang berada di Kota Bukittinggi sendiri maupun mereka-mereka yang berada di luar kota (perantau).

Identitas kelompok dan keinginan untuk mengembalikan kekuasaan kelompok menjadi faktor pendorong yang utama dalam pengembangan isu ini. Hal ini akan berakibat pada perluasan jaringan dan aktor dalam dinamika gerakan selanjutnya. Tetapi gerakan ini dari awal sudah dapat menentukan organisasi yang digunakan untuk menjadi wadah bagi gerakan. Pemanfaatan organisasi kultural KAK sebagai wadah sekaligus alat untuk membentuk identitas.

b. Perluasan Aktor dan Pematangan Gerakan

Pemanfaatan organisasi kultural yang sudah terbentuk sejak lama menjadi sumber kekuatan bagi ninik mamak untuk memperluas jaringan aktor pendukung gerakan. Para ninik mamak ini menyadari akan keterbatasan kekuatan mereka, kemudian menghubungi dan merangkul beberapa tokoh lain di luar organisasi mereka. Masih dalam tahap pengembangan isu, para ninik mamak ini sudah melibatkan beberapa tokoh intelektual asal Kurai yang berada di Padang seperti Hawari Siddik, Akmal, dan beberapa orang lainnya yang memang secara langsung terlibat dalam memformulasi kebijakan kembali ke nagari di tingkat provinsi. Terbentuknya Forum Cadiak Pandai Kurai pada awal 2002 di Kota Padang merupakan hasil dari penciptaan identitas.

Selain beberapa tokoh intelektual, para ninik mamak juga membawa tokoh-tokoh birokrat yang berada di luar Kota Bukittinggi. Misalnya pelibatan Asril Saman yang merupakan mantan Walikota Padang Panjang

dan juga pernah menjabat Sekretaris Daerah Kabupten Solok, Sabir SH yang merupakan mantan Kejati Sumbar dan pada saat itu menjadi anggota DPRD Kota Bukittinggi periode 1999-2004. Para ninik mamak di KAK mencari aktor-aktor yang dapat membawa mereka untuk bisa mengakses lembaga DPRD dengan menjadikan Fauzi Dt. Nagari Labiah menjadi ketua tim perumusan kembali ke Pemerintahan Nagari yang dibentuk KAK pada awal 2002. Fauzi Dt. Nagari Labiah pada saat itu merupakan anggota DPRD dan Ketua Komisi A bidang pemerintahan. Selain anggota DPRD, KAK juga melibatkan Wakil Walikota Khairul Hamdi yang juga merupakan putera asli Kurai. Pelibatan orang-orang yang sedang menjabat dalam eksekutif maupun legislatif ini merupakan strategi para ninik mamak untuk dapat memperkuat dukungan terhadap tuntutan mereka.

Strategi pelebaran aktor dan penglibatan mereka dalam merumuskan rancangan Pemerintahan Nagari di Kota Bukittinggi merupakan saat yang penting bagi gerakan ini. Pelibatan para tokoh intelektual dan elit-elit pemerintahan menjadi kekuatan penting sekaligus alat untuk mempermudah akses dalam menyampaikan tuntutan. Pada periode akhir 2001 hingga April 2002 banyak sekali diskusi, pertemuan, rapat intensif antara tokoh-tokoh KAK dengan tokoh intelektual dan elit-elit pemerintahan untuk membicarakan dan merumuskan tuntutan mereka. Para aktor intelektual dan aktor-aktor lainnya melihat penting untuk membuat rumusan yang jelas bagi tuntutan KAK. Pada tahap ini tim beserta dengan pendukung gerakan berhasil menyusun rancangan Pemerintahan Nagari yang mereka inginkan. Perluasan aktor dan perumusan tuntutan oleh tim menjadi landasan yang penting bagi pilihan aksi dan tindakan yang dilakukan oleh KAK dalam mencapai tuntutannya.

c. Pelaksanaan Aksi

Periode pelaksanaan aksi oleh aktor-aktor dalam gerakan KAK ini bukan hanya terjadi pada saat ini saja. Tetapi mereka sebelumnya sudah melakukan beberapa cara pendekatan personal dengan pihak-pihak yang dianggap bisa membantu memudahkan tuntutan mereka. Pelibatan tokoh-tokoh intelektual kota, orang-orang di eksekutif dan legislatif secara individual merupakan langkah awal yang strategis dalam memperluas aktor sekaligus memperkuat isu tuntutan. Para ninik mamak di KAK merancang

bentuk pemerintahan nagari di Kota Bukittinggi yang dituangkan dalam dokumen “Pokok Pikiran Kerapatan Adat Kurai tentang Penerapan Jiwa dan Semangat Kembali Berpemerintahan Nagari Kurai V Jorong dalam Kerangka Sistem Penyelenggaraan dan Struktur Kelembagaan Pemerintahan Otonomi Daerah Kota Bukittinggi Berdasarkan pada UU No. 22/1999”. Dokumen ini merupakan hasil pemikiran dari Tim Perumus Kembali ke Pemerintahan Nagari bersama dengan para ninik mamak, cadiak pandai dan alim ulama di Kurai. Pelibatan semua unsur ini menjadi penting untuk melegitimasi tuntutan.

Terbentuknya Tim Perumus Kembali ke Pemerintahan Nagari dan dihasilkannya dokumen Pokok Pikiran Kerapatan Adat Kurai tentang Penerapan Jiwa dan semangat kembali berpemerintahan Nagari Kurai V Jorong, menjadi awal aksi gerakan ini. Pada Mei 2002, KAK menyerahkan dokumen pokok pikiran tersebut kepada pemerintah Kota Bukittinggi. Penyerahan dokumen secara resmi kepada pemerintah Kota Bukittinggi merupakan tindakan pertama yang muncul secara formal. Dokumen pokok pikiran ini juga diserahkan kepada anggota DPRD melalui Fauzi Dt. Nagari Labiah selaku ketua tim perumus.

Tetapi setelah penyerahan dokumen ini tidak ada reaksi dari pemerintah kota. Tidak adanya tanggapan dari pemerintah kota terhadap tuntutan KAK ini didasari oleh kesadaran pemerintah bahwa tuntutan itu tidak akan dapat terlaksana. Pemerintah kota yang telah lebih dahulu menyurati pemerintah provinsi tentang usulan ini mendapat balasan bahwa Pemerintah Nagari di kota tidak dapat dilaksanakan karena bertentangan dengan pasal 126 UU No. 22/1999. Tetapi pemerintah Kota tetap membiarkan tuntutan KAK terus bergulir dan mengusahakan untuk tetap muncul karena memiliki kepentingan lain.

Pada saat yang bersamaan pemerintah Kota Bukittinggi memiliki persoalan dengan nagari-nagari yang termasuk wilayah perluasan Kota Bukittinggi dalam PP No. 84/1999. Nagari-nagari di Kabupaten Agam ini menolak untuk masuk wilayah kota dengan alasan tidak ada jaminan untuk berpemerintahan nagari. Untuk tetap dapat melaksanakan PP ini, pemerintah kota sudah mencoba untuk menjadikan adanya Pemerintahan Nagari di kota, tetapi ditolak oleh pemerintah provinsi. Keinginan pemerintah kota ini terlihat dari adanya pembentukan tim pengkajian

kehidupan masyarakat bernagari diperkotaan pada pertengahan tahun 2001 dan pengiriman surat usulan untuk ranperda pemerintahan nagari di kota kepada provinsi pada akhir 2001. Respon positif pemerintah kota untuk membentuk tim pengkajian ternyata tidak hanya ditujukan untuk menanggapi isu yang muncul dari KAK. Tetapi didasari oleh kepentingan pemerintah sendiri untuk tetap menarik perhatian nagari-nagari wilayah perluasan tersebut. Untuk kepentingan tersebut pemerintah kota membiarkan isu nagari tetap berkembang di KAK.

Melihat situasi yang diciptakan oleh pemerintah melalui perluasan wilayah kota, menimbulkan kekhawatiran dikalangan ninik mamak Kurai. Isu akan menjadi minoritas dan terpinggirkan secara politik muncul dalam diskusi-diskusi dikalangan elit adat. Isu ini yang kemudian dikembangkan oleh para ninik mamak di KAK, sehingga pada akhirnya mereka melakukan penolakan juga terhadap PP No. 84/1999 (*Padang Express*, 2002: 7). Pernyataan penolakan PP 84/1999 merupakan hasil keputusan dari KAK yang di adakan pada 5 dan 19 Mei 2002 di Balai Adat Kurai. Keputusan ini sangat didukung oleh para intelektual yang ada di Padang. Kemudian keputusan KAK tersebut dipertegas kembali dalam pertemuan ninik mamak bersama atas undangan Forum Cadiak Pandai Kurai di Padang pada 19 Juni 2002. Keputusan ini bertujuan untuk tetap menjaga dominasi orang Kurai atas wilayah Kota Bukittinggi. Dengan keputusan penolakan PP, artinya KAK mengambil langkah yang berseberangan dengan pemerintah Kota Bukittinggi.

Akhir 2002 tidak ada tanggapan sama sekali dari pemerintah kota maupun anggota DPRD yang telah membawa usulan dari KAK. Merasa tidak mendapat tanggapan dari pemerintah Kota Bukittinggi membuat KAK mencari cara lain untuk mengajukan tuntutan mereka. KAK mengirimkan dokumen tuntutan mereka ke pemerintah provinsi dan DPRD propinsi pada akhir 2002. Provinsi yang menyadari tuntutan kelompok kultural di kota akan menjadi persoalan bagi mereka, segera mengadakan pertemuan dengan kelompok adat dan termasuk dihadiri oleh para walikota, memberikan ruang untuk dapat bernagari di kota tetapi tidak untuk Pemerintahan Nagari secara struktural. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat kemudian menciptakan payung hukum dalam pelestarian adat dan sosial budaya Minangkabau dalam masyarakat di

wilayah kota dengan mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur No. 36/2003 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Nagari di Kota dalam Propinsi Sumatera Barat yang juga diatur tentang Kedudukan, Fungsi dan Wewenang Nagari di Kota. Merujuk pada Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 36 tahun 2003 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Nagari di Kota maka Surat Keputusan ini juga mengatur tentang permasalahan keseharian yang mungkin timbul karena pluralisme sosial masyarakat kota.

SK gubernur ini menimbulkan peluang baru bagi KAK untuk meningkatkan kembali gerakan mereka. Desakan secara terus menerus dilakukan pada pihak eksekutif (walikota), tetapi tetap tidak ada reaksi yang jelas. Tidak adanya reaksi yang positif dari pihak lawan (Pemerintah) membuat aktor (KAK) kehilangan semangat untuk mencari strategi lain. Apalagi sebagian besar para aktor politik dan intelektual dari Padang juga sudah tidak intensif lagi memberikan dukungan. Mereka tidak lagi mampu melakukan mobilisasi terhadap aktor-aktor yang sebelumnya sudah dapat dirangkul. Meskipun secara personal beberapa ninik mamak masih memiliki kedekatan dengan para aktor politik dan pemerintahan. Namun isu yang mereka usung tidak lagi menjadi fokus aksi mereka.

d. Fase Surutnya Aksi Gerakan

Penolakan dan tidak adanya reaksi dari pemerintah membuat gerakan ini melemah. Para aktor dalam KAK sudah merasa kehilangan kesempatan melihat reaksi pemerintah dan hambatan struktural legal formal yang menjadi kendala. Meskipun tujuan mereka sebagian adalah untuk mendapatkan eksistensi kultural dan politik, namun peluang yang diciptakan oleh isu sangat sedikit sehingga membuat mereka kehilangan strategi. Para aktor intelektual dan politis yang semula mendukung juga tidak terlihat lagi tindakannya. Para aktor yang menjadi anggota DPRD sendiri juga tidak memperlihatkan ada aksi lanjutan. Persoalannya kehadiran mereka dalam gerakan ini lebih mewakili personal dan bukan secara institusional legislatif. Para aktor ini juga memiliki keterbatasan gerak dalam kepentingan partai dan eksekutif.

Pendekatan dan komunikasi yang kurang baik juga tercipta antara ninik mamak dalam KAK dengan para anggota DPRD yang berasal dari Kurai.

Para ninik mamak menuduh orang-orang Kurai yang duduk di DPRD tidak peduli dengan kepentingan Kurai. Jika dilihat dari kuantitas jumlah orang Kurai yang berada di DPRD pada periode 1999-2004 ini cukup banyak. Dari 20 Anggota DPRD 9 di antaranya berasal dari Kurai. Namun tidak semua dari mereka memiliki komitmen untuk gerakan. Loyalitas terhadap partai memang menjadi lebih penting. Tidak adanya reaksi dari pemerintah dan hilangnya aktor pendukung membuat gerakan ini melemah. Hingga pertengahan 2004 gerakan KAK ini seperti hilang.

e. Penguatan Kembali Gerakan KAK

Setelah mengalami pelemahan aksi pada pertengahan 2003 hingga triwulan pertama 2004, aksi ini kembali memunculkan tanda-tanda kehadirannya lagi. Pada awal 2004 isu nagari di Kota Bukittinggi kembali terdengar. Para ninik mamak kembali membuka ruang diskusi dengan aktor-aktor politik. Jika dilihat dari sisi situasi politik saat itu, isu ini muncul berkaitan dengan peluang yang ada. Situasi politik lokal menjadi dinamis dan memanas akibat perubahan kebijakan pemilu oleh negara. Pemilu legislatif yang diadakan pada pertengahan 2004 dan pemilihan langsung walikota tahun 2005 menjadi ajang perebutan para politisi. Para aktor politik kembali mencari celah untuk bisa menarik simpati dari para pendukungnya. Pendekatan terhadap tokoh-tokoh adat merupakan satu hal yang dapat dikatakan penting bagi para politisi untuk kehidupan kota kecil seperti Bukittinggi. Pengaruh para tokoh adat masih menjadi ajang perebutan bagi kepentingan dukungan. Aktor-aktor yang akan maju pada pemilu legislatif mendekati para ninik mamak. Situasi ini juga dimanfaatkan oleh KAK untuk mengembalikan isu tuntutan mereka. Beberapa orang politisi yang bertarung dalam pemilu legislatif di antaranya adalah para aktor yang sebelumnya telah terlibat dalam gerakan seperti Sabir SH, Akmal Siddik, dan beberapa orang lainnya.

Reaksi yang lebih menarik datang dari pemerintah kota yang sedang berkuasa. Pada awal 2004 Walikota Bukittinggi justru bereaksi positif atas munculnya kembali isu bernagari. Buktinya pada April 2004 pemerintah Kota Bukittinggi mendanai penyelenggaraan seminar dan lokakarya tentang bernagari di kota dalam Otonomi Daerah bekerjasama dengan Universitas Andalas. Pasca seminar dan lokakarya tersebut

dilakukan beberapa kali pertemuan dengan pihak eksekutif membahas kelanjutannya (Wawancara dengan Dt. Pangulu Basa, 2 Desember 2009). Kegiatan-kegiatan tersebut hanya untuk mendekati dan menyenangkan hati para ninik mamak.

Tetapi perlu dicermati situasi politik pada saat ini sedang persiapan bagi pemilihan kepala daerah langsung yang sedang dirancang oleh pemerintah pusat. Ada kepentingan untuk menarik simpati dan dukungan dari para tokoh adat, yang menjadi dasar bagi aktor politik untuk kembali memunculkan isu gerakan. Peranan walikota menjadi sangat kuat dalam menjinakkan tuntutan dan mencari dukungan para ninik mamak. Kepentingan pejabat *incumbent* menjadi sangat nyata dalam upaya untuk merangkul kembali ninik mamak.

f. Apatisme Gerakan

Setelah pilkada dan terpilihnya Djufri sebagai walikota untuk kedua kalinya, ternyata reaksi terhadap tuntutan KAK tetap tidak ada. Pengabaian oleh Walikota Djufri sangat wajar, karena tidak lagi punya kepentingan. Hanya beberapa orang tokoh ninik mamak yang tetap memiliki kedekatan secara personal dengan walikota terutama tokoh ninik mamak yang berada di KAN. Rekomendasi yang ditawarkan oleh Universitas Andalas dan USAID tidak pernah ditindaklanjuti oleh pemerintah kota. Gerakan nagari di kota ini pada bulan-bulan berikutnya tidak terdengar lagi. Para tokoh politik pun tidak lagi berbicara tentang nagari dan Kurai.

Reaksi yang tidak jelas dari pemerintah kota serta dukungan yang tidak penuh dari DPRD membuat gerakan ini tidak kuat berkembang. Meskipun ada beberapa peluang politik yang dapat digunakan untuk mendukung aksi, namun dalam perjalannya isu dan gerakan lebih banyak digunakan oleh para tokoh politik untuk mencari dukungan. Pada akhir tahun 2007 pemerintah Provinsi Sumatera Barat menerbitkan Perda No. 2/ 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari. Perda ini secara jelas mengizinkan dibentuknya pemerintahan nagari di wilayah kota (pasal 4 ayat 2). Tetapi tidak ada satupun reaksi dari para aktor gerakan baik para ninik mamak di KAK maupun aktor di luar itu yang menanggapi peluang ini. Para tokoh adat (ninik mamak) yang menyadari tidak adanya lagi dukungan aktor-aktor politik membuat mereka juga kehilangan semangat.

Apatisme ini menyebabkan hilangnya gerakan. Selain itu aktor penggerak isu tidak lagi ada dan mereka juga tidak lagi memiliki kepentingan. Para tokoh adat yang menyadari tidak adanya lagi dukungan aktor-aktor politik membuat mereka juga kehilangan semangat. Apatisme ini menyebabkan hilangnya gerakan.

4. Permasalahan dalam Gerakan Politik KAK

Gerakan yang menggunakan organisasi KAK sebagai wadah gerakan ninik mamak, dapat dikatakan belum mencapai hasil yang menjadi tujuan mereka. Apatisme yang terakhir muncul dari kalangan aktor penggagas sangat terkait dengan berbagai faktor kesempatan atau peluang yang tak lepas dari semua dinamika yang telah terjadi. Ada beberapa permasalahan yang menyebabkan belum berhasilnya gerakan ini mencapai tujuannya.

a. Rendahnya Kemampuan Aktor dalam Mem-framing Identitas dan Isu

Identitas Kurai yang dibentuk oleh para tokoh KAK untuk memperjuangkan tuntutan mereka adalah pilihan untuk menegaskan posisi mereka terhadap pemerintah kota. Di sinilah peran kemampuan para aktor dalam meng-framing identitas dan isu yang mereka usung, sehingga para anggota kelompok sebagai pendukungnya memiliki keterikatan kognitif dan emosi dengan kelompok. Kekuatan identitas ini yang sulit didapat dalam gerakan KAK. Para aktor pendukung hanya memiliki kesadaran tinggi ketika mereka berada dalam kelompok. Keterlibatan para politisi, birokrat, mantan birokrat maupun intelektual yang semuanya berasal dari Kurai memang menunjukkan bahwa kesadaran mereka akan identitas ada. Namun ketika berhadapan dengan pihak luar (pemerintah) atau lembaga politik, identitas ini seperti hilang. Identitas Kurai dapat dikalahkan oleh identitas lain individu itu sendiri. Kemampuan ninik mamak untuk menguatkan identitas etnik ternyata belum mampu untuk memobilisasi dukungan bagi gerakan mereka.

b. Gerakan Dikendalikan oleh Kepentingan Aktor-aktor di Luar KAK

Perluasaan aktor merupakan suatu strategi yang diambil oleh KAK untuk dapat memiliki akses terhadap kekuasaan. Tetapi permasalahan kemudian muncul adalah kemampuan aktor penggagas (ninik mamak) dalam mengendalikan aktor-aktor yang dilibatkan. Mereka tidak memiliki

kendali atas aktor-aktor di luar KAK tersebut. Para ninik mamak dengan statusnya tidak dapat memobilisasi sumberdaya ini menjadi kekuatan untuk mendesak tuntutan mereka pada pemerintah.

Jika dilihat dari dinamika gerakan, ada pembalikan aksi oleh para aktor dari luar organisasi ini. Justru gerakan dan organisasi dimanfaatkan oleh aktor-aktor politik ini untuk kepentingan mereka. Aktor-aktor yang terlibat dalam jaringan gerakan KAK merupakan jaringan urban dari para mantan birokrat, politisi, dan birokrat yang sebagian memiliki keinginan menjadi pejabat pemerintahan atau keinginan memperoleh akses menuju sumber-sumber negara. Kepentingan berbagai aktor dengan berbagai posisi ini juga memanfaatkan isu nagari. Dalam *contentious politics* klaim gerakan kolektif sebagian besar dipengaruhi kepentingan obyektif para aktor (Aspinal dan Fealy, 2003: 12). Para aktor ini tidak hanya terbatas pada para elit adat, tetapi meliputi orang-orang yang berada dalam kekuasaan maupun orang-orang yang dekat dengan kekuasaan. Keberadaan aktor ini yang kemudian banyak berperan dalam mengatur dinamika gerak aksi (Aspinal dan Fealy, 2003: 12). Bahkan peran pemerintah kota dalam mengendalikan dinamika gerakan terlihat cukup kuat dalam setiap fase gerakan. Kepentingan Walikota (Djufri) dapat mengendalikan penguatan isu, ketika ia punya kepentingan mencari dukungan dalam pilkada. Ia mampu mengendalikan aktor-aktor politis dan mantan birokrat yang terlibat dalam gerakan dengan merangkul mereka masuk dalam kekuasaannya. Demikian juga dengan para politisi yang memperebutkan kursi legislatif maupun akses terhadap pemerintah, dengan mudah memanfaatkan isu gerakan ini.

c. Perpecahan dalam Internal Aktor Gerakan

Perpecahan dalam tubuh aktor gerakan KAK terlihat pada kalangan elit adat (ninik mamak). Keberadaan organisasi kultural KAN yang dibentuk oleh pemerintah menjadi salah satu pendorong pecahnya aktor ninik mamak (elit adat). KAN yang notabene mendapat fasilitas dari negara menjadikan adanya persaingan yang tidak sehat juga di kalangan ninik mamak dengan kekuasaan. Sebagian ninik mamak justru mendekati kepada pemerintah kota yang tidak merespon tuntutan KAK. Kecurigaan antara ninik mamak yang dekat dengan Walikota dan mereka yang tidak memiliki

akses terhadap pusat kekuasaan juga menyebabkan pecahnya ninik mamak. Perpecahan ini berimplikasi kepada buruknya interaksi mereka dalam membangun strategi untuk melakukan aksi.

Perpecahan ternyata tidak hanya terjadi di kalangan aktor ninik mamak (elit adat), aktor lain seperti birokrat pun kemudian pecah dari gerakan. Pihak pemerintah (walikota) memiliki peran dalam memecah aktor ini, dengan menarik para aktor mantan birokrat seperti Asril Saman, Sabir SH, dan intelektual seperti Akmal Siddik menjadi tim ahli walikota untuk Kurai, ia berhasil mengendalikan aktor ini. Dengan ditariknya beberapa aktor gerakan oleh pihak lawan, membuat gerakan kehilangan aktor pendukung yang strategis. Dengan memecah aktor ini, walikota (pemerintah kota) lebih mudah untuk menaklukkan dan mengendalikan gerakan. Pecahnya para aktor ini diidentifikasi sebagai salah satu penyebab lemahnya gerakan.

d. Lemahnya Organisasi KAK sebagai Wadah Gerakan

Sukses tidaknya perjuangan orang/kelompok tergantung pada kemampuan mereka untuk memaksimalkan akses menuju sumber-sumber organisasional. KAK memang sudah berhasil menarik dukungan dari berbagai aktor di luar organisasi. Tetapi kelemahan KAK adalah dalam mengendalikan dan memobilisasi aktor pendukung tersebut. Organisasi KAK tidak begitu kuat untuk dapat menentukan jalannya aksi dan dinamika gerakan. KAK sebagai wadah organisasi ternyata tidak kuat, baik secara struktur internal maupun hubungannya dengan pihak luar. Dalam tubuh KAK sendiri keanggotaan konstan (tetap) yang didasari ketentuan kultural ternyata tidak lagi lengkap. Dilihat dari latar belakang para penghulu ini, umumnya mereka tidak memiliki kekuasaan secara politis.

Posisi organisasi yang tidak diakui secara legal formal oleh pemerintah membuat KAK tidak memiliki kekuasaan apa-apa dalam politik dan pemerintahan. Secara kultural pun kemudian KAK juga tidak kuat, karena adanya lembaga kultural lain yang dibentuk oleh negara yakni KAN. Secara sosiologis KAN lebih banyak berinteraksi dengan masyarakat bawah, karena memiliki kewenangan yang diberikan oleh negara terkait dengan masalah adat yang berhubungan dengan negara itu sendiri. Posisi ini yang seringkali membuat KAK lemah ketika berhubungan dengan negara

(pemerintah kota) dalam memperjuangkan tuntutan mereka.

e. *Hambatan Legal Formal*

Permasalahan yang sangat krusial mempengaruhi gerakan ini adalah berkaitan dengan ketentuan *legal formal* (Undang-undang). Kebijakan pemerintah Provinsi Sumatera Barat tentang Pemerintahan Nagari dalam Perda No. 9/2000 sebagai landasan legal formal pelaksanaan pemerintahan nagari, tidak memberi ruang bagi terbentuknya pemerintahan nagari di wilayah kota. Kebijakan pembentukan pemerintahan nagari sebagai pemerintahan terendah hanya diberlakukan di wilayah kabupaten. Sedangkan di wilayah kota tidak adanya kedudukan struktural nagari, karena Undang-Undang No. 22/1999 tidak memberikan kesempatan untuk itu. Pasal 126 UU No. 22/1999 tentang pemerintahan daerah menetapkan bahwa sistem pemerintahan terendah di kota adalah kelurahan. Alasan bertentangan dengan regulasi pemerintah pusat kemudian menjadi landasan untuk tidak menerapkan pemerintahan nagari sebagai sebuah struktur pemerintahan formal di wilayah kota. Benturan legal formal ini membuat gerakan kehilangan isu sentral dan menjadi semakin lemah ketika berhadapan dengan negara (pemerintah kota). KAK tidak lagi memiliki alasan yang kuat untuk mendesak tuntutan mereka pada pemerintah kota.

KESIMPULAN

Jika dilihat dari perjalanan dinamika gerakan KAK, setiap aksi dan motivasi gerakan ini, ternyata tidak dengan mudah dapat disimpulkan bahwa gerakan ini murni gerakan yang menuntut agar ada pemerintahan nagari di Kota Bukittinggi. Ada beberapa temuan utama dalam penelitian ini.

Pertama, motivasi politis maupun ekonomi sangat kuat mempengaruhi gerakan ini. Dari awal kemunculan isu nagari ini juga sudah menunjukkan gejala motivasi politik. Isu ini sengaja dihembuskan oleh penguasa (pemerintah kota) untuk kepentingan dukungan bagi pelaksanaan perluasan kota. Di sisi lain, kelompok kultural (KAK) yang memiliki harapan sangat besar terhadap peluang, segera menangkapnya secara positif. KAK menginginkan untuk dapat memiliki akses istimewa dalam

pemerintahan. Secara politis, KAK menghendaki adanya representasi mereka dan kelompok Kurai dalam kebijakan maupun birokrasi.

Kedua, Gerakan KAK ini lebih banyak dikendalikan oleh para elit pendukung di luar organisasi. Mereka yang dilibatkan oleh para tokoh adat, seperti politisi, birokrat dan mantan birokrat, kemudian muncul sebagai orang-orang yang memiliki peran utama dalam menentukan dinamika gerakan, tetapi sangat termotivasi secara politis. Kepentingan untuk dapat memiliki kekuasaan atau jabatan menjadi motivasi kuat bagi para aktor ini untuk memunculkan isu dan aksi. Ada pola yang menunjukkan bahwa menguatnya gerakan selalu bersamaan dengan *event* politik memperebutkan kekuasaan seperti pemilu legislatif dan pilkada. Para aktor ini justru orang-orang yang sangat dekat dengan kekuasaan. Kepentingan untuk mendapat akses istimewa terhadap kekuasaan, membuat mereka secara sadar memanfaatkan isu dan gerakan.

Ketiga, Kelompok kultural KAK sebagai penggagas utama gerakan justru belum memperoleh hasil dari gerakan. Tujuan untuk mendapat akses terhadap kebijakan dan birokrasi tidak dapat dicapai oleh para elit adat. Akses ekonomi terhadap sumber-sumber negara sama sekali tidak mendapat peluang. Posisi mereka yang secara politis lemah terhadap pemerintah kota membuat mereka tidak bisa memaksakan tujuannya. Kelemahan ninik mamak ini juga berpengaruh terhadap kemampuan mereka dalam mengendalikan aktor pendukung seperti politisi, birokrat maupun mantan birokrat. Kapital simbolik yang mereka miliki tidak disertai dengan kapital politik. Sehingga menjadi sangat wajar ketika dengan sangat mudah ninik mamak dimanfaatkan oleh para politisi lokal untuk memobilisasi pendukung bagi kepentingan mereka sendiri. Praktek mobilisasi komunal bagi dukungan politik menjadi lahan sangat menjanjikan bagi para politisi lokal dalam suasana politik yang kompetitif.

Keempat, lemahnya organisasi gerakan merupakan salah satu faktor yang menyebabkan mudahnya gerakan dimanfaatkan oleh aktor-aktor pendukung maupun pihak lawan (pemerintah). Secara organisasional, KAK memiliki kelemahan internal terutama menyangkut keanggotaan yang tidak lengkap, sehingga secara kultural pun legitimasi mereka dipandang tidak kuat oleh para elit adat yang berada di luar struktur organisasi. Apalagi KAK sendiri memiliki lembaga saingan yakni KAN yang

dilegitimasi kuat oleh negara. Persaingan pengaruh antara KAK dengan KAN menjadi pemicu pecahnya para elit adat dalam merumuskan tujuan dan aksi gerakan. Interaksi yang tidak intensif dan tidak tersusun secara rapi membuat organisasi KAK memiliki sedikit sekali informasi. Akibatnya kemampuan organisasi untuk mengendalikan aktor-aktor pendukung menjadi sangat lemah, apalagi aktor-aktor pendukung politisi dan birokrat justru memiliki akses yang lebih besar terhadap informasi.

CATATAN AKHIR

- ¹ Banyak Koran-koran lokal memunculkan kasus ini setiap hari. Bahkan Menteri Dalam Negeri harus hadir di daerah untuk memfasilitasi penyelesaian konflik ini. Gerakan penentangan yang dilakukan oleh pemerintah Agam dan masyarakatnya cukup intensif, tetapi Pemerintah kota Bukittinggi terkesan tidak melakukan apa-apa. Namun ide tentang nagari di Kota dapat dijadikan jalan bagi pemerintah Kota untuk menarik simpati daerah-daerah yang menolak tersebut. Lihat juga "Agam dan Bukittinggi berebut Tapal Batas. Sinar Harapan, Kamis 12 April 2002.
- ² Tidak ada bukti tertulis tentang siapa yang hadir dan apa yang didiskusikan. Menurut para penghulu ini mereka lebih sering membicarakan soal model nagari yang akan dibentuk dengan menelusuri sejarah nagari Kurai Limo Jorong.

DAFTAR PUSTAKA

- Aspinal, Edward dan Greg Fealy (eds). 2003. *Local Power and politics in Indonesia: Decentralisation and democratization*. Singapore. ISEAS.
- Babbie, Earl. 1983. *The Practice of Social Research*. California, Wadsworth Publishing Company.
- Bungin, Burhan. 2003. *Analisis Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.
- Dokumen Kerapatan Adat Kurai. 1991. "Sejarah dan Adat Kurai V Jorong". Tim Perumus: Badan Pekerja Kerapatan Adat Kurai, Bukittinggi, 29 Juni
- Dwipayana, AA GN Ari. 2004. *Bangsawan dan Kuasa, Kembalinya Para*

- Ningrat di Dua Kota*. Yogyakarta. IRE Press.
- Eko, Sutoro. 2005. *Mengantang Asap? Kritik dan Refleksi atas Gerakan Kembali ke Nagari*. Yogyakarta. IRE Press.
- Etek, Azizah dkk. 2004. *Dinamika Pemerintahan Lokal Kota Bukittinggi*. kerjasama Pemerintah Kota Bukittinggi dengan Lembaga Pengembangan Masyarakat Institut Ilmu Pemerintahan (LPM-IIP)
- Gamson, William A and David S Mayer. 1966. "Framming Political opportunity" dalam Doug McAdam, John D. McCarthy and Mayer N. Zald (eds), *Comparative perspectives on social Movements: Political Opportunities, Mobilizing structure and Cultural Framing*. New York. Cambridge University Press.
- Hadiz, Vedi R. 2005. *Dinamika Kekuasaan Ekonomi Politik Indonesia Pasca Soeharto*. Jakarta. LP3ES.
- Hadjerat, H. M. 2006. *Sejarah Nagari Kurai Limo Jorong serta Pemeintahannya, Pasar dan Kota Bukittinggi*. Bukittinggi. Peduli Masyarakat Kurai.
- Haryanto. 2005. *Kekuasaan Elit, Suatu Bahasan Pengantar*. Yogyakarta.S2 PLOD UGM dan JIP UGM
- Hasbi, M. et.al. 1990. *Nagari, Desa dan Pembangunan Pedesaan di Sumatera Barat*. Padang. Yayasan Genta Budaya.
- Kahin, Audrey. 2005. *Dari Pemberontakan ke Integrasi: Sumatera Barat dan Politik Indonesia 1926-1998*. Jakarta. Yayasan Obor Indonesia.
- Klandermans, Bert. 2005. *Protes dalam Kajian Psikologi Sosial*, Terj. Helly P Soetjipto. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Klinken, Gerry van. 2007. *Perang Kota Kecil, Kekerasan Komunal, dan Demokratisasi di Indonesia*. Terj. Bernard Hidayat. Jakarta. KITLV dan Yayasan Obor.
- Markoff, John (2002). *Gelombang Demokrasi Dunia, Gerakan Sosial dan Perubahan Politik*. Terj. Ari Setyaningrum. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- McAdam, Doug, John D. McCarthy and Mayer N. Zald (eds), 1996. *Comparative perspectives on social Movements: Political Opportunities, Mobilizing structure and Cultural Framing*, Ney York.,Cambridge University Press.
- McAdam, Doug, Sidney Tarrow and Charles Tilly. 2001. *Dynamics of Contention*. New York. Cambridge University Press.

- McCarthy, John D. and Mayer N Zald . 1977. "Resource Mobilization and social Movements: A partial Theory", dalam *American Journal of Sociology* Vol. 82 No. 6, May
- Moleong, Lexy. 1998. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung. Remaja Rosda Karya.
- Niel, Robert van. 1984. *Munculnya Elite Modern di Indonesia*. Terj. Sahara Deliar Noer. Jakarta. Pustaka Jaya.
- Putra, Fadillah (ed). 2006. *Gerakan Sosial: Konsep, Stategi, Aktor, Hambatan dan Tantangan Gerakan Sosial di Indonesia*. Malang. Kerjasama Averroes Press dengan PPSD,
- Pokok Pikiran, Penerapan Jiwa dan Semangat Kembali Berpemerintahan Nagari Kurai V Jorong dalam Kerangka Sistem Penyelenggaraan dan Struktur Kelembagaan Pemerintahan Otonom Daerah Kota Bukittinggi Berdasarkan Pada UU N0. 22 Tahun 1999*. Diajukan oleh Kerapatan Adat Kurai kepada Walikota Bukittinggi, 2002
- Porta, Donatello della dan Mario Diani. 1999. *Social Movements: An Introduction*. London. Blackwell Publisher.
- Siti, R. Zuhro (ed). 2009. *Demokrasi Lokal: Peran Aktor dalam Demokratisasi*. Yogyakarta. Ombak.
- Schulte Nordholt, Henk dan Gerry van Klinken (ed). 2007. *Politik Lokal di Indonesia*. Jakarta. KITLV.
- Springga, Daniel. 2001. "Peran Elit Lokal *vis a vis* Globalisasi" dalam *Renai, Jurnal Politik Lokal dan Sosial-humaniora*, Edisi Juli-September.
- Tarrow, Sidney. 1998. *Power in Movement: Social Movements and Contentious Politics*. Cambrige University Press
- Varma, S.P. 2001. *Teori Politik Modern*. Terj. Effendi Tohir. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.
- Zetra, Aidinil (2005). "Mungkinkah Pemerintahan Nagari di Kota?" dalam *Padang Ekspres*, 24 Juli
- "Agam dan Bukittinggi berebut Tapal Batas" dalam *Sinar Harapan*, 12 April 2002
- "Gamawan Fauzi Pemerintahan Nagari Dapat Dibentuk di Kota" dalam *Padang Ekspres*, 22 Agustus 2006.
- "Warga Kurai Tolak Perluasan Wilayah" dalam *Padang Ekspres*, 7 April 2002